



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PEMILU SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 23 – 25 JANUARI 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Januari 2024. Kunjungan dipimpin oleh Yth. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T., Ketua Komisi II DPR RI dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunsppek ke Kota Binjai dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI mengunjungi Mitra-Mitra Kerja Komisi II DPR RI yang ada di Kota Binjai yaitu Pemerintah Kota Binjai, KPU Kota Binjai, Bawaslu Kota Binjai dan Gakumdu Kota Binjai beserta seluruh Camat dan Lurah se Kota Binjai. Kedatangan Komisi II DPR RI untuk mengawasi persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak di Kota Binjai.

Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota Binjai, KPU Kota Binjai, Bawaslu Kota Binjai dan Gakumdu Kota Binjai, didapatkan poin-poin kunjungan sebagai berikut:

1. Perkembangan dan realisasi program, perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sampai saat ini berjalan dengan baik. Perekaman hingga saat ini telah mencapai 223.061 dan telah dicetak sebanyak 217.026, dengan persentase sebesar 97.29%.
2. Adanya ketersediaan blangko KTP Elektronik (KTP-el) di Kota Binjai yang cukup serta tersedia sampai saat ini dengan jumlah sebanyak 2.157 keping dengan pendistribusian yang baik dan lancar;
3. Ketersediaan alat rekam dan alat cetak masing-masing sebanyak 1 set mendukung pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Akan tetapi, dalam rangka memperlancar pekerjaan dalam perekaman dan pencetakan, telah dianggarkan pada tahun 2024 pengadaan alat rekam sebanyak 1 (satu) set.

4. Dalam rangka mengembangkan berbagai inovasi pelayanan adminduk, Pemerintah Kota Binjai juga telah membuat aplikasi pelayanan adminduk berbasis daring. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan aplikasi tersebut didominasi oleh SDM yang kurang dari segi kuantitas. Sumber Daya Manusia Dukcapil Kota Binjai sudah cukup baik dari segi kualitas, hanya saja perlu dilakukan peningkatan kompetensi yang rutin sesuai dengan kebutuhan.
5. Sejak bulan April tahun 2022 data kependudukan sudah dikelola terpusat, sehingga data penduduk diambil/ berasal dari Ditjendukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai hanya melakukan pemutakhiran data melalui pelayanan harian.
6. Langkah Pemerintah Kota Binjai dalam menjamin Netralitas ASN menjelang tahapan Kampanye dan tahapan Pemungutan suara Pemilu 2024 adalah dengan menegaskan kepada seluruh ASN disetiap kesempatan bahwa tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu calon legislative dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan apapun. Apabila terbukti melanggar aturan akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Binjai Nomor 500.6-5987 tanggal 18 Desember 2023 tentang Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
7. Wujud program Pemerintah Kota Binjai dalam rangka ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan Sosialisasi Pemilu serentak tahun 2024 kepada masyarakat di wilayah Kota Binjai adalah dengan :
 - a. memberikan sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula yaitu kaum Millenial dan juga kepada lapisan Masyarakat Kota Binjai yang sudah punya hak pilih juga memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada Ormas, LSM, Yayasan, Organisasi Kepemudaan yang ada di Kota Binjai untuk berperan aktif mensukseskan Pemilu dan Pemilukada 2024 yang telah dilaksanakan pada 07 Desember 2023 dan akan dilaksanakan pada 26 Januari dan 02 Februari 2024.
 - b. memberikan Pendidikan Politik dan Hibauan melalui Media social dan cetak (Spanduk, Standing Banner) agar ikut berpartisipasi mensukseskan Pemilu dan Pemilukada 2024.
10. Potensi kerawanan Pemilu di Kota Binjai masih relatif rendah dan untuk mengantisipasinya secara preventif agar tidak terjadi masalah Pemilu serentak 2024 adalah dengan cara pemetaan titik titik rawan dan dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak pengamanan Pemilu Khususnya TNI dan Polri, diantaranya dengan penandatanganan pakta integritas.
11. Penerapan Koordinasi dan Konsolidasi Pemerintah Kota Binjai dengan KPU dan Bawaslu Kota Binjai, Polres, Kodim dan Kejaksaan terutama Tahapan Kampanye, Pendistribusian logistic Kampanye, Pendistribusian dan Pengamanan Surat Suara, serta Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Suara

pada Pemilu 2024 adalah dengan membentuk Desk Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2024 serta Posko Pojok Pemilu sebagai tempat pertemuan Forkopimda dan KPU serta Bawaslu membicarakan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Perkembangan Politik di Kota Binjai dan masalah yang terjadi di dalamnya agar Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Berjalan dengan baik dan lancar.

Terakhir sebagai penutup Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan setidaknya ada empat Indikator Sukses pemilu, yaitu:

1. Semua tahapan yang telah dirancang berjalan dengan baik
2. Tingkat partisipasi masyarakat tinggi
3. Masyarakat yg hadir bisa memilih dengan nyaman, tanpa khawatir terintimidasi
4. Output pemilu berkualitas menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang berkualitas

Menjaga kewibawaan Pemilu adalah tanggung jawab kita bersama, seluruh stakeholder harus memiliki komitmen untuk pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, seluruh tahapan pemilu, termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara harus betul dilakukan dengan cara yang berkualitas.

Kota Binjai, 25 Januari 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.